

**EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA
PEKANBARU TAHUN 2019**

Oleh : Asesta Saputri

E-mail : asestasaputri@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,
Pekanbaru-Riau 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Sistem proteksi kebakaran adalah sistem yang terdiri dari peralatan kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk sistem proteksi aktif, pasif maupun cara – cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/ PRT/ M/ 2008). Sistem proteksi kebakaran dapat di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu aktif dan pasif. Sistem proteksi kebakaran aktif merupakan sistem proteksi kebakaran yang lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis kimia seperti Alat Pemadam 4 Api Ringan dan pemadam khusus (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/ PRT/ M/ 2008). Sedangkan, sistem proteksi pasif adalah sarana, sistem atau rancangan yang menjadi bagian dari sistem sehingga tidak perlu digerakkan secara aktif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Kebijakan Sistem Proteksi Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan adalah teori Dunn, 1998: 405 dalam Subarsono Ag, 2006:126. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, jenis data yang di gunakan adalah data sekunder dan data primer. Hasil dari penelitian ini adalah setiap bangunan diwajibkan memiliki alat proteksi kebakaran berguna untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penghuni gedung.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Sistem Proteksi Kebakaran.

ABSTRACT

Fire protection system is a system consisting of completeness equipment and facilities, both installed and built in buildings that are used for active, passive protection systems and management methods in order to protect buildings and the environment against fire hazards (Regulation of the Minister of Public Works Number 26 / PRT/ M/ 2008). Fire protection systems can be grouped into two parts, namely active and passive. An active fire protection system is a complete fire protection system consisting of manual and automatic fire detection systems, water-based fire extinguishing systems such as sprinklers, standpipes and fire hoses, as well as chemical-based fire extinguishing systems such as small fire extinguishers and special extinguishers (Regulation). Minister of Public Works Number 26/PRT/M/2008 Meanwhile, a passive protection system is a means, system or design that is part of the system so that it does not need to be actively driven. This research was conducted at the Pekanbaru City Fire and Rescue Service. The purpose of this study is to describe and analyze the Evaluation of the Fire Protection System Policy at the Pekanbaru City Fire and Rescue Service. The theory used is the theory of Dunn, 1998: 405 in Subarsono Ag, 2006:126. The research method used is descriptive qualitative with interview and documentation data collection techniques, the type of data used is secondary data and primary data. The results of this study are that every building is required to have a fire protection device that is useful to ensure the safety and comfort of building occupants.

Keywords: Policy Evaluation, Fire Protection System.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam penanggulangan kebakaran ditempat kerja adalah penyediaan alat proteksi kebakaran aktif. Namun pada kenyataannya penyediaan alat proteksi aktif sebagaimana tidak sesuai dengan standar, akibatnya jika terjadi kejadian kebakaran dapat mengakibatkan kerugian baik fisik dan finansial.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru merupakan lembaga teknis dan bagian dari organisasi pemerintahan Kota Pekanbaru yang memberikan pelayanan pada masyarakat dalam bentuk pelayanan terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru memiliki wewenang penuh dari Walikota Pekanbaru dalam melakukan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang penanggulangan dan pencegahan kebakaran.

Salah satu bidang yang ada di Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Pekanbaru adalah Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru mempunyai pegawai sebanyak 36 orang, pegawai Bidang Pengendalian

Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yang telah ditunjuk dan diuraikan secara perbidang berdasarkan Bab III Pasal 3 Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 98 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 85 tahun 2013 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru.

Sistem proteksi kebakaran adalah sistem yang terdiri dari peralatan kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk sistem proteksi aktif, pasif maupun cara – cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran (Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 26/ PRT/ M/ 2008). Sistem proteksi kebakaran dapat di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu aktif dan pasif. Sistem proteksi kebakaran aktif merupakan sistem proteksi kebakaran yang lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis kimia seperti Alat Pemadam4 Api Ringan dan pemadam khusus (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/ PRT/ M/ 2008). Sedangkan, sistem proteksi pasif adalah sarana, sistem atau rancangan yang menjadi bagian dari sistem sehingga tidak perlu digerakkan secara aktif (Ramli 2010).

Berdasarkan hasil prasurvei dilapangan penulis menemukan beberapa gejala dan fenomena-fenomena sebagai berikut :

- a. Masih sering terjadi keterlambatan dalam pemadaman kebakaran yang disebabkan luasnya wilayah, seperti contoh kebakaran di Rumbai berhubung jarak jauh sedangkan kebakaran sudah meluas baru mobil pemadam datang.
- b. Masih kurangnya kemampuan pegawai dalam menggunakan alat safety kebakaran sebagai bentuk melakukan proteksi kebakaran sehingga kejadian kebakaran di lapangan tidak tertangani yang mengakibatkan tingginya tingkat kebakaran.

KERANGKA TEORI

Konsep Evaluasi dan Kebijakan

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Selain itu menurut Subarsono (2006:119) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan.

Beberapa pakar kebijakan publik menetapkan evaluasi (*evaluation*) sebagai salah satu proses kebijakan publik. James Anderson menyatakan bahwa evaluasi (*evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan? Sedangkan Michael Howlet dan R. Ramesh menyatakan bahwa evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Ndraha mengatakan, evaluasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam lingkup metode dan teknik kontrol. Teknik kontrol tersebut dilakukan sebelum, sepanjang, dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan.

Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah terselesaikan; tetapi juga mennyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Evaluasi kebijakan berkenaan dengan kinerja kebijakan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. Hasil evaluasi menentukan apakah kebijakan dilanjutkan ataukah membawa isu kebijakan yang baru, yang mengarah pada dua pilihan: diperbaiki atau revisi kebijakan, ataukah dihentikan.

Menurut Dunn evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat

memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisi ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Kebijakan merupakan suatu istilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan, definisi yang diberikan cukup beragam, dan dapat dipandang, baik secara luas maupun secara sempit, bergantung pihak yang berkepentingan terhadapnya. Derbyshire (dalam Wibawa) memberikan batasan terhadap policy sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. Rencana kegiatan tersebut merupakan produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan wakil rakyat (legislatif). Kebijakan yang dihasilkan/direncanakan bertujuan untuk memberikan efek perbaikan terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi. Kebijakan yang dihasilkan/direncanakan merupakan produk kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif.

Evaluasi Kebijakan

Menurut Briant & White (dalam Samodra Wibawa) evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant & White di atas, mengarahkan penilaian evaluasi

kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan. Sementara itu, Rossi & Freeman mengemukakan evaluasi: *Evaluations are conducted to answer a variety of questions of related to that we have listed as the three focus of evaluation research: program conceptualization and design, program implementation (Monitoring and accountability) and program utility (impact and efficiency assessments).*

Pengertian evaluasi oleh Rossi & Freeman memberitahukan bahwa evaluasi program harus dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian evaluasi yaitu: desain dan konseptualisasi program, implementasi program (monitoring dan akuntabilitas) serta kegunaan program (dampak dan efisiensi). Selanjutnya, menurut Rossi & Freeman bahwa tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan adalah tersedianya tujuan (goals) dan kriteria (criteria). Goals merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa goals ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan.

Menurut Samodra Wibawa evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh

pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain.

Berdasarkan penjelasan evaluasi oleh Samodra Wibawa di atas, informasi yang didapat dari evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan bahkan juga bisa memberikan informasi faktor-faktor yang dapat dimanipulasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menghindari program yang merugikan masyarakat dan menentukan keberlanjutan program di masa mendatang. Jika hasil dari evaluasi program menunjukkan bahwa dalam program tersebut ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan perubahan, maka para pengambil keputusan sebaiknya harus menanggapi dengan serius. Artinya mereka harus mempunyai ide-ide baru guna memperbaiki programnya, sehingga program tersebut dapat terhindar dari kegagalan dan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat *bias* dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (1994) mencakup 6 indikator sebagai berikut.

Tabel 1.3 Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Kriteria	Penjelasan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah

		tercapai?
2.	Efisiensi	Apakah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses menjadi lebih cepat?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
4.	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan membuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
6.	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber : Dunn, 2013: 405

Evaluasi kebijakan pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan. Evaluasi kebijakan menyediakan data dan informasi yang bisa dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan menunjukkan rekomendasi-

rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria evaluasi biasanya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Indikator masukan (*input indicators*): bahan-bahan dan sumberdaya yang dipergunakan untuk mengimplementasikan kebijakan;
- b. Indikator proses (*process indicators*): cara-cara dengan mana bahan-bahan dan sumber daya diolah atau ditransformasikan menjadi penyediaan pelayanan;
- c. Indikator keluaran (*output indicators*): barang-barang atau pelayanan-pelayanan yang diproduksi oleh suatu program;
- d. Indikator dampak (*outcome indicators*): hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu program

Evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengikuti suatu model tertentu. Mengacu pada Bridgman dan Davis, sedikitnya ada empat model evaluasi yang bisa diterapkan, yaitu:

- a. Evaluasi ketepatan (*appropriateness evaluation*) Evaluasi yang dilakukan untuk membantu pembuat kebijakan dalam menentukan apakah sebuah program yang baru perlu dibuat atau apakah program yang ada masih harus dipertahankan.
- b. Evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*) Menghitung seberapa besar barang dan jasa yang mampu dihasilkan sesuai dengan sumber daya yang dikeluarkan.

- c. Evaluasi efektivitas (*effectiveness evaluation*) Mengidentifikasi apakah sebuah program menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi publik.
- d. Evaluasi meta (*meta-evaluation*) Mengevaluasi proses evaluasi itu sendiri.

Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuansistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran (Permen PU Nomor 26/PRT/M/2008 Pasal 1 ayat 1).

Menurut KEPMEN PU No.10/KPTS/2000, sarana proteksi kebakaran aktif masalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman. Adapun yang termasuk kedalam sistem proteksi kebakaran aktif, adalah: APAR, detektor kebakaran, alarm, sprinkler, hidran.

Sistem Proteksi Kebakaran menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 terbagi menjadi 2 yaitu sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sistem proteksi kebakaran adalah:

- a. Bahaya kebakaran dari alat atau material yang ada
- b. Tingkat toksik dari material dan asap yang diproduksi
- c. Luas dari ruangan
- d. Frekuensi dari operasi yang berbahaya
- e. Jarak dari instalasi lain yang berbahaya
- f. Akses yang tersedia untuk memadamkan kebakaran
- g. Kemampuan dari tim pemadam kebakaran
- h. Waktu respons dari petugas pemadam kebakaran terdekat
- i. Sumber daya yang tersedia untuk tim pemadam kebakaran

Selanjutnya menurut Paimin Napitupulu (2015:7) Sistem proteksi kebakaran meliputi:

- a. Sistem proteksi kebakaran pasif
- b. Sistem proteksi kebakaran aktif
- c. Manajemen penanggulangan kebakaran

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Sistem Proteksi Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru

Pembangunan di Kota Pekanbaru semakin meningkat. Saat ini banyak pembangunan gedung sebagai pendukung kinerja penduduk di Kota Pekanbaru. Pembangunan gedung yang beragam dan kompleks menuntut aspek keselamatan dan rasa aman terhadap bangunan gedung dan lingkungannya. Salah satu aspek keselamatan yang penting dari sebuah bangunan gedung adalah keselamatan dari bahaya kebakaran. Kebakaran merupakan suatu permasalahan yang tidak bisa lepas dari manusia. Kerugian yang

diakibatkan oleh kebakaran tidak hanya berupa kerusakan bangunan saja, melainkan kerugian yang menyangkut moral dan jiwa manusia. Beberapa penyebab kebakaran antara lain : rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran, kurangnya kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menanggulangi bahaya kebakaran, sistem penanganan kebakaran yang belum terwujud dan terintegrasi, rendahnya prasarana dan sarana sistem proteksi kebakaran bangunan yang memadai.

Efektivitas

Efektifitas kebijakan sistem proteksi kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena Sistem proteksi kebakaran merupakan sistem yang terdiri dari peralatan kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk sistem proteksi aktif, pasif maupun cara – cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran. Dengan adanya kebijakan sistem proteksi kebakaran, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik.

Untuk mengukur efektivitas proses sistem proteksi kebakaran, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa sistem yang dijalankan dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses pelaksanaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang

telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, sistem proteksi kebakaran dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat.

Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung merupakan sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Agar terciptanya Efektifitas kebijakan sistem proteksi kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru maka harus diperhatikan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan disebutkan bahwa pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun meminimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Burhan Gurning, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Rabu tanggal 10 Januari 2021 yang mengatakan bahwa:

“Setiap bangunan memungkinkan untuk menjadi timbulnya kebakaran akibat tidak berfungsinya utilitas gedung, untuk itu setiap bangunan

diwajibkan memiliki alat proteksi kebakaran, alat proteksi kebakaran berguna untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penggunaan gedung”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap bangunan memungkinkan untuk menjadi timbulnya kebakaran akibat tidak berfungsinya utilitas gedung, untuk itu setiap bangunan diwajibkan memiliki alat proteksi kebakaran, alat proteksi kebakaran berguna untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penggunaan gedung.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irni Dewi Tari, S.STP selaku Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Rabu tanggal 10 Januari 2021 yang mengatakan bahwa:

“Masih kurang efektifitasnya kesadaran dari masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya alat proteksi kebakaran oleh sebab itu Badan penanggulangan Bencana dan pemadam Kebakaran berkerjasama dengan pihak terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan untuk melakukan inspeksi pemeriksaan kelengkapan alat proteksi”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa saat ini masih kurang efektifitasnya kesadaran dari masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya alat proteksi kebakaran oleh sebab itu Badan penanggulangan Bencana dan pemadam Kebakaran berkerjasama dengan pihak terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan untuk melakukan inspeksi pemeriksaan kelengkapan alat proteksi.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Irni Dewi Tari, S.STP selaku Sekretaris Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Rabu tanggal 10 Januari 2021 yang mengatakan bahwa :

“Semua personil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru menguasai prosedur tanggap darurat, hal ini bertujuan agar pegawai mampu melakukan proteksi kebakaran”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua personil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru menguasai prosedur tanggap darurat, hal ini bertujuan agar pegawai mampu melakukan proteksi kebakaran.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Irna, SE, M.Si selaku Kasubag Umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Jumat tanggal 12 Januari 2021 yang mengatakan bahwa :

“Untuk meningkatkan prosedur tanggap darurat maka pegawai telah menguasai prosedur tersebut melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan agar pegawai lebih terampil dalam menguasai prosedur tanggap darurat terutama kejadian di lapangan ”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan prosedur tanggap darurat maka pegawai telah menguasai prosedur tersebut melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan agar pegawai lebih terampil dalam menguasai prosedur tanggap darurat terutama kejadian di lapangan.

Efisien

Keberadaan sistem proteksi kebakaran sangatlah penting karena sistem tersebut adalah sistem penanggulangan kebakaran dapat

dilakukan secara efisien, namun sistem proteksi kebakaran harus diperkuat dengan manajemen penanggulangan kebakaran yang meliputi organisasi, prosedur dan latihan penanggulangan kebakaran.

Sistem proteksi kebakaran adalah salah satu sistem yang dapat diterapkan untuk menanggulangi kebakaran pada bangunan. Sistem proteksi kebakaran dibedakan menjadi 2, yaitu sistem proteksi aktif kebakaran dan sistem proteksi pasif kebakaran. Sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif bekerja dalam sinergi untuk melindungi bangunan dan nyawa manusia. Sistem proteksi aktif berperan sebagai pendeteksi api serta melakukan pemadaman darurat sebelum pemadam kebakaran sampai di lokasi terjadinya kebakaran. Sedangkan sistem proteksi pasif lebih mengacu pada desain, baik arsitektur maupun struktur, untuk dapat menghambat penjarangan api dan mempercepat proses evakuasi.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Burhan Gurning selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Rabu tanggal 10 Januari 2021 yang menyatakan bahwa :

“Setiap bangunan hendaknya didirikan dengan memperhatikan arsitektur gedung secara efisien, hal ini berguna agar nantinya terjadi kejadian kebakaran dapat memudahkan penyelamatan gedung, selain itu setiap bangunan gedung harus memiliki tangga darurat atau pintu darurat untuk memudahkan setiap orang yang didalam gedung melakukan penyelamatan diri”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap

bangunan hendaknya didirikan dengan memperhatikan arsitektur gedung secara efisien hal ini berguna agar nantinya terjadi kejadian kebakaran dapat memudahkan penyelamatan gedung, selain itu setiap bangunan gedung harus memiliki tangga darurat atau pintu darurat untuk memudahkan setiap orang yang didalam gedung melakukan tindakan penyelamatan.

Kecukupan

Dalam kegiatan kebijakan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan ketersediaan sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, maupun cara – cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran harus mencukupi.

Keselamatan gedung merupakan kondisi yang menjamin keselamatan dan tercegahnya bencana dalam suatu gedung beserta isinya (manusia, peralatan, barang) yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak berfungsinya utilitas gedung.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ina, SE, M.Si selaku Kasubag Umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Jumat tanggal 12 Januari 2021 yang mengatakan bahwa :

“Untuk meningkatkan keterampilan semua pihak dalam menguasai alat proteksi kebakaran maka perlunya diberikan pelatihan tentang proteksi kebakaran pada masyarakat dan pelaku usaha”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan keterampilan semua

pihak dalam menguasai alat proteksi kebakaran maka perlunya diberikan pelatihan tentang proteksi kebakaran pada masyarakat dan pelaku usaha.

Perataan

Kebakaran merupakan bencana yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja yang umumnya ditimbulkan oleh kelalaian manusia yang mengakibatkan kerugian jiwa dan materi. Kebakaran dapat terjadi pada pusat perbelanjaan modern dilihat dari banyaknya potensi pemicu kebakaran seperti korsleting listrik, percikan api dari pantry atau rokok yang mengenai bahan-bahan yang cepat merambatkan api seperti kain, kertas, atau bahan bakar yang menetes di area parkir kendaraan. Pusat perbelanjaan modern memiliki area yang luas dan ramai dikunjungi berbagai kalangan dari mulai balita hingga lanjut usia menjadikan proses evakuasi sulit apabila terjadi kebakaran. Maka dari itu gedung pusat perbelanjaan modern harus dilengkapi dengan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, serta sarana penyelamatan jiwa yang baik sesuai peraturan yang berlaku untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran pada bangunan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM pada Jumat tanggal 12 Januari 2021 yang mengatakan bahwa :

“Luasnya wilayah Kota Pekanbaru yakni sekitar 632 km2 tidak sebanding dengan jumlah SDM tenaga instruktur yang hanya 4 orang untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang alat proteksi kebakaran, jumlah instruktur tersebut sangat sedikit, sehingga perataan

pelaksanaan sosialisasi alat proteksi kebakaran tidak maksimal”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak sebandingnya jumlah SDM tenaga instruktur yang hanya 4 orang untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang alat proteksi kebakaran, jumlah instruktur tersebut sangat sedikit, sehingga pelaksanaan perataan sosialisasi alat proteksi kebakaran tidak maksimal.

Responsivitas

Kasus kebakaran merupakan salah satu bentuk kecelakaan yang memerlukan perhatian khusus dan memerlukan pencegahan (preventif) untuk mengurangi bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Salah satunya bisa dengan manajemen risiko, karena sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan jika terjadi suatu bencana seperti kebakaran.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Burhan Gurning, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Rabu tanggal 10 Januari 2021 yang mengatakan bahwa :

“Setiap bangunan gedung harus mempunyai pengelolaan proteksi kebakaran untuk mencegah terjadinya penjaran kebakaran ke ruangan ataupun bangunan lain. Setiap bangunan gedung harus mengupayakan proteksi sebaik mungkin untuk dapat menanggulangi kebakaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem proteksi kebakaran pada bangunan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap

bangunan gedung harus mempunyai pengelolaan proteksi kebakaran untuk mencegah terjadinya penjaran kebakaran ke ruangan ataupun bangunan lain. Setiap bangunan gedung harus mengupayakan proteksi sebaik mungkin untuk dapat menanggulangi kebakaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem proteksi kebakaran pada bangunan.

Ketepatan

Sistem proteksi kebakaran yang terdapat di bangunan merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sistem proteksi kebakaran berfungsi sebagai sistem pengaman dan pendeteksi terjadinya kebakaran. Peristiwa kebakaran tidak akan terjadi jika sistem proteksinya sesuai dengan standar yang ditentukan salah satunya dengan ketersediaan alat pemadam api ringan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Burhan Gurning, SPd, M.Pd selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Rabu tanggal 10 Januari 2021 yang mengatakan bahwa :

“Setiap bangunan harus memiliki alat pemadam api ringan. penempatan alat pemadam api ringan atau apar harus mudah dijangkau dan terdapat tanda pemasangan dengan baik dan benar”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap bangunan harus memiliki alat pemadam api ringan. penempatan alat pemadam api ringan atau apar harus mudah dijangkau dan terdapat tanda pemasangan dengan baik dan benar.

Hambatan Dalam Evaluasi Kebijakan Sistem Proteksi Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru

Penanggulangan kebakaran melalui sistem proteksi aktif dan sarana penyelamatan jiwa dilakukan dengan pemenuhan paling sedikit meliputi APAR, hidran, deteksi asap dan api, sistem alarm kebakaran, sprinkler, pengendali asap, pintu darurat, jalur evakuasi, tangga darurat, dan tempat titik kumpul aman. Penanggulangan kebakaran bertujuan untuk memastikan setiap orang bebas dari bahaya api, asap, dan bahaya lain. Terdapat beberapa hambatan dalam Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru antara lain :

- a. Kurang Pemahaman Masyarakat Tentang Sarana Penyelamatan Jiwa
Menurut PERMEN PU No. 26/PRT/M/2008 setiap bangunan harus dilengkapi dengan sarana evakuasi yang dapat digunakan oleh penghuni bangunan, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri dengan aman tanpa terhambat hal-hal yang diakibatkan oleh keadaan darurat. Sarana penyelamat jiwa meliputi sarana jalan keluar, tangga darurat, tanda petunjuk arah, pintu darurat, penerangan darurat, dan titik berkumpul, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami sarana penyelamatan jiwa yang tersedia pada suatu bangunan.

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang petugas Operasional Dinas Pemadam Kebakaran :

“Tersedianya jalur akses masuk untuk mobil pemadam kebakaran kelokasi bangunan tidak didukung dengan tanda jalur masuk warna kontras yang dapat dilihat pada malam hari, tingkat kesesuaian akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran masih belum optimal”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa saat ini jalur akses mobil pemadam ke lokasi-lokasi kebakaran masih sulit selain tidak didukung tanda jalur, mobil sulit menempuh lokasi karena jalan sempit bahkan keterlambatan melakukan pertolongan akibat kerumunan warga.

- b. Sarana Jalan Keluar Kurang Memadai

Gedung harus memiliki beberapa sarana jalan keluar yang dapat digunakan sebagai jalan untuk menyelamatkan diri ketika keadaan darurat, namun kurang memadai karena kurang lebarnya akses keluar penghuni.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala seksi pada Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penanggulangan Bencana :

“Tanda petunjuk keluar di gedung sebagian besar sudah sesuai dengan standar NFPA 101 dan SNI 03-1746-2000. Sama halnya , dengan sarana jalan keluar, tingkat kesesuaiannya sebesar 80% artinya elemen terpasang tetapi ada sebagian kecil yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Elemen yang tidak

terpasang di gedung umumnya adalah tidak dituliskan petunjuk "EXIT".

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar gedung atau bangunan yang memiliki jalur akses keluar saat melakukan evakuasi belum memiliki petunjuk exit sebagai petunjuk jalan.

c. Kurangtahuan Posisi Tangga Darurat

Berdasarkan hasil observasi tangga darurat harus sesuai dengan standar SNI 03-1746-2000 dan NFPA 101. Gedung biasanya memiliki tangga darurat di bagian ujung koridor timur dan ujung koridor barat pada setiap lantai, dari basement hingga lantai yang ada.

Berikut hasil wawancara dengan saah seorang masyarakat :

" Pada pintu darurat dan penerangan darurat di gedung atau bangunan tidak tersedia, dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Seharusnya setiap gedung atau bangunan memiliki pintu darurat yang dilengkapi dengan penerangan darurat untuk memudahkan jalur evakuasi".

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak bangunan dan gedung yang memiliki pintu darurat tapi tidak dilengkapi oleh penerangan darurat untuk memudahkan jalur evakuasi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang dijumpai dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang evaluasi kebijakan Sistem Proteksi

Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru maka pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sudah cukup melaksanakan evaluasi sistem proteksi dengan menanamkan pemahaman kepada pemilik bangunan agar menyediakan APAR, hidran, deteksi asap dan api, sistem alarm kebakaran, sprinkler, pengendali asap, pintu darurat, jalur evakuasi, tangga darurat, dan tempat titik kumpul aman.

2. Adapun hambatan dalam evaluasi kebijakan Sistem Proteksi Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru adalah :

- a. Kurang pemahaman masyarakat tentang sarana penyelamatan jiwa
- b. Sarana Jalan Keluar Kurang Memadai
- c. Kurangtahuan Posisi Tangga Darurat

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dunn, William N, 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. CV.Indra prahasta, Bandung.

Islamy, M. Irfan, 2012, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Labolo, Muhadam, 2007, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Kelapa Gadin Permai, Jakarta

Ndraha Taliziduhu, 2012, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

_____, 2013, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*, Rineka Cipta, Jakarta

_____, 2015, *Kybernology Sebuah Kontruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta

Nogi, S. Tangkilisan, 2007, *Manajemen Publik*, Jakarta, Penerbit Gramedia

Nugroho D, Riant. 2013. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia,

_____, 2020, *Model-Model Analisis Manajemen Resiko Untuk Kebijakan Publik*, Jakarta, Gramedia

Paimin Napitupulu, 2015, *Evaluasi Sistem Proteksi Kabakaran Perusahaan*, Penerbit Alumni, Bandung

Sudaryana, Bambang, 2017, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta, Deepublish

Wahab, Solichin Abdul, 2015. *Analisis Kebijakan*. Penerbit Alfabeta, Jakarta

Wibawa Samodra Purbokusumo, Yuyun Pramusinto Agus. 1994, *Evaluasi*

Kebijaksanaan Publik, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi, 2017, *Kebijakan Publik, : Teori, Proses dan Studi Kasus*, Jakarta, Publishing

Artikel Ilmiah

Adi, Kawara Rigen, *Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Studi di PT. PJB UP Brantas Malang)*, Jurnal. Stikes Vol. 3 No. 1, 70-85

Amalia Putri, Okta, (2016), *Evaluasi Penerapan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif di PT Reckitt Benckiser Indonesia Semarang Factory Departemen Pre Produksi*

Kurniati, Erna (2012), *Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Apartemen ditinjau dari Sarana Penyelamatan dan Sistem Proteksi Pasif (Studi Kasus di Apartemen Solo Paragon)*, Jurnal UNS Vol. 5, No. 2, 221-237

Kurnianto, Agung, (2018) *Evaluasi Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran di Apartemen Green Bay Pluit. Hasil penilaian pada penelitian ini untuk Nilai Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan (NKSKB)*

Noor, Qadhariyah Fitriyanti Putri, (2020) *Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran pada*

Bangunan Gedung Hotel
Bertingkat

Stephanie (2017), *Evaluasi Sistem Proteksi Pasif Kebakaran Bangunan (Studi Kasus: Millennium ICT Centre)*, Jurnal USU Vol. 3, No. 1, 64-69

Peraturan-Peraturan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru